



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Implikasi Hukum Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Oleh DPMPTSP Provinsi Papua

Terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu (Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Oleh PT Indo)

Asiana Lestari Di Kabupaten Boven Digoel)

Muhammad Faturrahman Hadid, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan	15
1. Tinjauan Izin Lokasi	16

2. Tinjauan Perizinan Lingkungan	19
3. Tinjauan Izin Usaha Perkebunan	22
B. Tinjauan Mengenai Masyarakat Hukum Adat dan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat	23
1. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat.....	23
2. Tinjauan Hak Atas Tanah.....	25
C. Tinjauan Mengenai Pengaturan dan Prosedur Pengajuan Izin Kawasan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27
1. Tinjauan Pengaturan Mengenai Pengakuan Kawasan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat.....	27
2. Tinjauan Prosedur Pengajuan Izin Kawasan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38
D. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	56
B. Cara Pengumpulan Data.....	57
C. Lokasi Penelitian	61
D. Subjek Penelitian.....	61
E. Alat Penelitian	63

F. Jalannya Penelitian	63
------------------------------	----

G. Analisis Data	65
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 66

A. Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Yang Diajukan Oleh PT Indo Asiana Lestari Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Boven Digoel	66
B. Dampak Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu Yang Berada Pada Lokasi Kawasan Hutan Adat	84

BAB V PENUTUP..... 104

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA 107